

SALINAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3/O/2022
TENTANG
PENDAMPINGAN PEMBANGUNAN BERPREDIKAT ZONA INTEGRITAS
WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI TAHUN 2022

SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

- Menimbang : a. bahwa untuk membangun unit kerja berpredikat Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi, perlu dilakukan duplikasi praktik baik antarunit kerja;
- b. bahwa terdapat beberapa satuan kerja yang telah mendapatkan predikat Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi pada tahun 2021, sehingga dapat diduplikasi praktik baik oleh satuan kerja baru di wilayah kerjanya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Pendampingan Pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
2. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1813);
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 963);
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1176/P/2020 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI TENTANG PENDAMPINGAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI TAHUN 2022.

KESATU : Menetapkan pelaksanaan Pendampingan Pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi Unit Kerja di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dengan pembagian tugas pendampingan pembangunan unit kerja berpredikat zona integritas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Jenderal ini.

KEDUA : Pendampingan pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilakukan secara terkoordinasi.

KETIGA : Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Keputusan Sekretaris Jenderal ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) unit kerja pusat, unit kerja

pendamping, dan/atau unit kerja yang diberikan pendampingan yang relevan.

KEEMPAT : Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Januari 2022

SEKRETARIS JENDERAL,

TTD.

SUHARTI

Salinan sesuai dengan aslinya.
Kepala Biro Hukum
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,

TTD.

Dian Wahyuni
NIP 196210221988032001

SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3/O/2022
TENTANG
PENDAMPINGAN PEMBANGUNAN ZONA
INTEGRITAS WILAYAH BEBAS KORUPSI
TAHUN 2022

A. SASARAN

Sasaran yang akan dicapai dalam pendampingan yaitu:

- a. unit kerja dapat menduplikasi praktik baik yang telah dilakukan oleh unit kerja yang telah berhasil membangun Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi; dan
- b. unit kerja mendapat inspirasi untuk menciptakan inovasi pemberian layanan.

B. PENDAMPINGAN

Dalam pendampingan ini:

- a. unit kerja pendamping merupakan unit kerja yang telah mendapatkan predikat Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi;
- b. unit kerja yang didampingi merupakan unit kerja yang belum mendapatkan predikat Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi; dan
- c. unit utama/pusat memberikan fasilitasi dalam pelaksanaan pendampingan.

C. PEMBAGIAN TUGAS PENDAMPINGAN PEMBANGUNAN UNIT KERJA BERPREDIKAT ZONA INTEGRITAS

NO	WILAYAH	UNIT KERJA YANG DIDAMPINGI	UNIT KERJA PENDAMPINGAN
1.	Sumatera Utara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Provinsi Sumatera Utara 2. Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sumatera Utara 3. Balai Bahasa Provinsi Sumatera Utara 4. Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah I 5. Universitas Sumatera Utara 6. Universitas Negeri Medan 7. Politeknik Negeri Medan 	Balai Besar Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bidang Bangunan dan Listrik
2.	Riau	<ol style="list-style-type: none"> 1. Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Provinsi Riau 2. Balai Bahasa Provinsi Riau 3. Universitas Riau 4. Politeknik Negeri Bengkalis 	Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Riau
3.	Kepulauan Riau	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Kepulauan Riau 2. Balai Pelestarian Nilai Budaya Provinsi Kepulauan Riau 3. Kantor Bahasa Provinsi Kepulauan Riau 4. Universitas Maritim Raja Ali Haji 	Politeknik Negeri Batam
4.	Jambi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Provinsi Jambi 2. Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jambi 3. Universitas Jambi 4. Kantor Bahasa Provinsi Jambi 	Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Jambi
5.	Lampung	<ol style="list-style-type: none"> 1. Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Provinsi Lampung 2. Kantor Bahasa Provinsi Lampung 3. Universitas Lampung 4. Institut Teknologi Sumatera 5. Politeknik Negeri Lampung 	Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Lampung

NO	WILAYAH	UNIT KERJA YANG DIDAMPINGI	UNIT KERJA PENDAMPINGAN
6.	Banten	<ol style="list-style-type: none"> 1. Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Provinsi Banten 2. Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Banten 3. Kantor Bahasa Provinsi Banten 4. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 	Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Banten
7.	Daerah Khusus Ibukota Jakarta	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bahasa 2. Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini 3. Museum Nasional 4. Museum Kebangkitan Nasional 5. Museum Sumpah Pemuda 6. Museum Perumusan Naskah Proklamasi 7. Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III 8. Pusat Penguatan Karakter 9. Politeknik Negeri Jakarta 10. Politeknik Negeri Media Kreatif 11. Universitas Negeri Jakarta 12. Universitas Terbuka 13. Universitas Pembangunan Nasional Indonesia Veteran Jakarta 	<p>Koordinator: Pusat Asesmen Pendidikan</p> <p>Anggota:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra 2. Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi DKI Jakarta 3. Museum Basoeeki Abdullah 4. Galeri Nasional Indonesia 5. Universitas Indonesia 6. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai 7. Direktorat Sekolah Menengah Atas 8. Biro Sumber Daya Manusia
8.	Jawa Barat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Taman Kanak-Kanak dan Pendidikan Luar Biasa 2. Balai Pelestarian Nilai Budaya Provinsi Jawa Barat 3. Museum Kepresidenan Balai Kirti 4. Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra 5. Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat 6. Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah IV 7. Universitas Pendidikan Indonesia 	<p>Koordinator: Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Jasmani dan Bimbingan Konseling</p> <p>Anggota:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Balai Besar Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Pertanian 2. Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Ilmu Pengetahuan Alam

NO	WILAYAH	UNIT KERJA YANG DIDAMPINGI	UNIT KERJA PENDAMPINGAN
		8. Institut Teknologi Bandung 9. Universitas Siliwangi 10. Universitas Singaperbangsa Karawang 11. Institut Seni Budaya Indonesia Bandung 12. Institut Pertanian Bogor 13. Politeknik Negeri Subang 14. Politeknik Negeri Indramayu	3. Pusat Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Provinsi Jawa Barat 4. Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Jawa Barat 5. Balai Besar Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bisnis dan Pariwisata 6. Balai Besar Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bidang Mesin dan Teknik Industri 7. Politeknik Negeri Bandung 8. Politeknik Manufaktur Bandung 9. Universitas Padjadjaran
9.	Jawa Tengah	1. Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah 2. Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jawa Tengah 3. Balai Konservasi Borobudur 4. Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah 5. Balai Pengembangan Multimedia Pendidikan dan Kebudayaan 6. Universitas Jenderal Soedirman 7. Universitas Sebelas Maret 8. Universitas Negeri Semarang 9. Universitas Tidar 10. Institut Seni Indonesia Surakarta 11. Politeknik Negeri Semarang 12. Politeknik Negeri Cilacap 13. Politeknik Maritim Negeri Indonesia	Koordinator: Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Jawa Tengah Anggota: 1. Pusat Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah 2. Balai Pelestarian Situs Manusia Purba Sangiran 3. Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VI 4. Universitas Diponegoro
10.	Jawa Timur	1. Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan	Koordinator: Balai Besar

NO	WILAYAH	UNIT KERJA YANG DIDAMPINGI	UNIT KERJA PENDAMPINGAN
		<p>Tenaga Kependidikan Pendidikan Kewarganegaraan dan Ilmu Pengetahuan Sosial</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jawa Timur 3. Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur 4. Balai Pengembangan Media Televisi Pendidikan dan Kebudayaan 5. Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VII 6. Universitas Airlangga 7. Institut Teknologi Sepuluh Nopember 8. Universitas Jember 9. Universitas Negeri Malang 10. Universitas Negeri Surabaya 11. Universitas Trunojoyo Madura 12. Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur 13. Politeknik Negeri Malang 14. Politeknik Negeri Madura 15. Politeknik Negeri Banyuwangi 16. Politeknik Negeri Jember 17. Politeknik Elektronika Negeri Surabaya 18. Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya 19. Politeknik Negeri Madiun 20. Akademi Komunitas Negeri Pacitan 21. Akademi Komunitas Negeri Putra Sang Fajar 	<p>Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bidang Otomotif dan Elektronika</p> <p>Anggota:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Provinsi Jawa Timur 2. Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Jawa Timur 3. Universitas Brawijaya
11.	Daerah Istimewa Yogyakarta	<ol style="list-style-type: none"> 1. Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 2. Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 3. Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 4. Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan dan Kebudayaan 5. Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah V 	<p>Koordinator: Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Matematika</p> <p>Anggota:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 2. Balai Besar Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi

NO	WILAYAH	UNIT KERJA YANG DIDAMPINGI	UNIT KERJA PENDAMPINGAN
		6. Universitas Negeri Yogyakarta 7. Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta 8. Institut Seni Indonesia Yogyakarta 9. Akademi Komunitas Negeri Seni dan Budaya Yogyakarta	Seni dan Budaya 3. Museum Benteng Vredenburg Yogyakarta 4. Balai Pelestarian Nilai Budaya Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 5. Universitas Gadjah Mada
12.	Bali	1. Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Provinsi Bali 2. Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Bali 3. Balai Bahasa Provinsi Bali 4. Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VIII 5. Universitas Udayana 6. Universitas Pendidikan Ganesha 7. Institut Seni Indonesia Denpasar 8. Politeknik Negeri Bali	Koordinator: Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Bali Anggota: Balai Pelestarian Nilai Budaya Provinsi Bali
13.	Nusa Tenggara Barat	1. Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Nusa Tenggara Barat 2. Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat 3. Universitas Mataram	Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Barat
14.	Kalimantan Barat	1. Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Provinsi Kalimantan Barat 2. Balai Pelestarian Nilai Budaya Provinsi Kalimantan Barat 3. Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Barat 4. Universitas Tanjung Pura 5. Politeknik Negeri Pontianak 6. Politeknik Ketapang 7. Politeknik Negeri Sambas	Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat
15.	Kalimantan Selatan	1. Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan 2. Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Selatan	Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Provinsi Kalimantan Selatan

NO	WILAYAH	UNIT KERJA YANG DIDAMPINGI	UNIT KERJA PENDAMPINGAN
		3. Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XI 4. Universitas Lambung Mangkurat 5. Politeknik Negeri Banjarmasin 6. Politeknik Negeri Tanah Laut	
16.	Sulawesi Selatan	1. Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan 2. Balai Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bidang Kelautan Perikanan Teknologi Informasi dan Komunikasi 3. Politeknik Negeri Ujung Pandang 4. Politeknik Pertanian Negeri Pangkajene Kepulauan 5. Universitas Hasanuddin 6. Institut Teknologi Bacharuddin Jusuf Habibie 7. Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah IX 8. Balai Pelestarian Nilai Budaya Provinsi Sulawesi Selatan 9. Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Sulawesi Selatan 10. Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Selatan	Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Provinsi Sulawesi Selatan

SEKRETARIAS JENDERAL,

TTD.

SUHARTI

Salinan sesuai dengan aslinya.
Kepala Biro Hukum
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,

TTD.

Dian Wahyuni
NIP 196210221988032001